



## PRIORITAS DAERAH PEMBANGUNAN MENGGUNAKAN INDEKS KOMPOSIT DI JAWA BARAT

### PRIORITIZING REGIONAL DEVELOPMENT USING COMPOSITE INDEX IN WEST JAWA

Yoga Putut Afandi<sup>a\*</sup>, Anang Muftiadi<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Perencanaan Wilayah dan Kota, SAPPK, Institut Teknologi Bandung; Kota Bandung

<sup>b</sup> Administrasi Bisnis, FISIP, Universitas Padjadjaran; Sumedang

\*Korespondensi: yogapututa@gmail.com; anang.muftiadi@unpad.ac.id

#### Info Artikel:

- Artikel Masuk: 12 Desember 2021
- Artikel diterima: 9 September 2022
- Tersedia Online: 30 September 2023

#### ABSTRAK

Ketimpangan pembangunan antar daerah adalah tantangan utama dalam kebijakan pembangunan. Penentuan prioritas pembangunan yang tepat menjadi kunci untuk mengatasi ketimpangan ini. Penelitian ini menghadirkan pengembangan dan penerapan Indeks Komposit Prioritas Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Barat sebagai alat evaluasi yang relevan. Metodenya melibatkan pengumpulan data dari sejumlah indikator pembangunan, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), persentase penduduk miskin, dan Gini rasio. Hasil analisis menunjukkan bahwa indeks komposit ini memberikan gambaran yang jelas tentang tingkat prioritas pembangunan di berbagai daerah provinsi. Hasil dari indeks komposit membagi daerah-daerah menjadi tiga tingkat prioritas: tinggi, menengah, dan rendah. Hal ini membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Daerah dengan prioritas tinggi menunjukkan kebutuhan mendesak untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, daerah dengan prioritas menengah dan rendah menunjukkan ruang untuk peningkatan yang lebih baik dalam pembangunan mereka. Penelitian ini juga menyoroti peran infrastruktur dalam percepatan pembangunan, terutama di daerah-daerah dengan prioritas tinggi. Fokus pada pengembangan infrastruktur dasar, seperti irigasi, air bersih, sanitasi, dan transportasi, menjadi kunci dalam upaya pemerataan pembangunan. Pendekatan berbasis ilmiah dan teknokratik digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih rasional dan objektif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

**Kata Kunci:** Ketimpangan Pembangunan, Prioritas; Pembangunan Daerah, Indeks Komposit, Jawa Barat, Infrastruktur

#### ABSTRACT

The regional development disparities pose a major challenge in development policies. Accurate determination of development priorities is key to addressing these disparities. This research introduces the development and implementation of the Composite Index of Regional Development Prioritization in West Java Province as a relevant evaluation tool. The methodology involves collecting data from various development indicators, including the Human Development Index (HDI), Gross Regional Domestic Product (GRDP), the percentage of the population living in poverty, and the Gini ratio. The results of the analysis indicate that this composite index provides a clear overview of the development priority levels in various regions of the province. The outcomes of the composite index categorize the regions into three priority levels: high, medium, and low. This assists the West Java Provincial Government in designing more targeted development policies. Regions with high priorities indicate an urgent need for development equalization and improving the well-being of the population. Meanwhile, regions with medium and low priorities show room for better improvement in their development. This study also highlights the role of infrastructure in expediting development, especially in high-priority areas. The focus on developing basic infrastructure such as irrigation, clean water, sanitation, and transportation becomes crucial in efforts to promote equitable development. A scientific and technocratic approach is utilized to support more rational and objective decision-making in the planning and implementation of regional development.

**Keywords:** Development Disparities, Prioritization, Regional Development, Composite Index, West Java, Infrastructure

## 1. PENDAHULUAN

Dalam upaya mengatasi ketimpangan pembangunan antar daerah, kebijakan pembangunan seringkali menghadapi tantangan yang kompleks. Salah satu permasalahan sentral yang muncul adalah ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi antar daerah. Ketidakseimbangan ini, di antara faktor lainnya, sering kali dipicu oleh bias dalam penentuan prioritas pembangunan. Misalnya, daerah perkotaan cenderung tumbuh lebih cepat daripada daerah perdesaan (Démurger, 2001). Namun, sumber daya anggaran yang terbatas mendorong perlunya kejelasan dalam menentukan fokus pembangunan. Di sinilah peran penting indeks komposit sebagai alat evaluasi yang dapat memberikan gambaran yang akurat tentang tingkat prioritas daerah dan kompleksitas fenomena sosial serta lingkungan.

Untuk memastikan efektivitasnya, perlu diingat bahwa indeks komposit hanya akan memberikan hasil yang meyakinkan jika metodologinya kuat dan transparan. Kesalahan dalam asumsi teoretis dan metodologis dapat menghasilkan data yang tidak dapat dipercaya (Saisana et al., 2005). Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya evaluasi yang cermat terhadap landasan teoritis dan metodologis yang mendasari penggunaan indeks komposit, demi menghindari ketidakpastian dalam perumusan kebijakan pembangunan (Freudenberg, 2003). Dalam konteks ini, indeks komposit memegang peranan sentral dalam pembuatan kebijakan dan penentuan prioritas dalam pembangunan daerah.

Indeks komposit adalah alat yang berharga dalam mengevaluasi dan memprioritaskan pembangunan daerah. Penelitian sebelumnya telah menggunakannya untuk mengukur berbagai aspek pembangunan daerah, seperti infrastruktur dan potensi ekonomi (Faradis & Afifah, 2020; Affandi, 2020; Riantika & Utama, 2017). Data yang dikumpulkan dari berbagai tingkat wilayah, termasuk desa dan provinsi, kemudian digunakan untuk menentukan daerah yang memiliki prioritas lebih tinggi dalam proses pembangunan. Sebagai contoh, beberapa penelitian lebih menitikberatkan pada sektor-sektor potensial atau peluang pertumbuhan tertentu dalam menentukan prioritas pembangunan suatu daerah. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang lebih terfokus untuk perencanaan pembangunan regional.

Provinsi Jawa Barat, dengan beragam karakteristik di antara 27 kabupaten/kota yang ada di dalamnya, merupakan subjek utama penelitian ini. Beberapa wilayah di provinsi ini menonjol dengan ekonomi yang lebih kuat dan populasi yang lebih besar daripada yang lain. Perbedaan ini, sebagian besar, bisa diatribusikan pada ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya alam. Berdasarkan teori pembangunan wilayah, daerah-daerah ini cenderung berkembang lebih cepat guna mencapai efisiensi ekonomi (Priyarsono, 2017). Ketimpangan ini juga terkait dengan disparitas dalam tingkat pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Barat (Aprianoor et al., 2015).

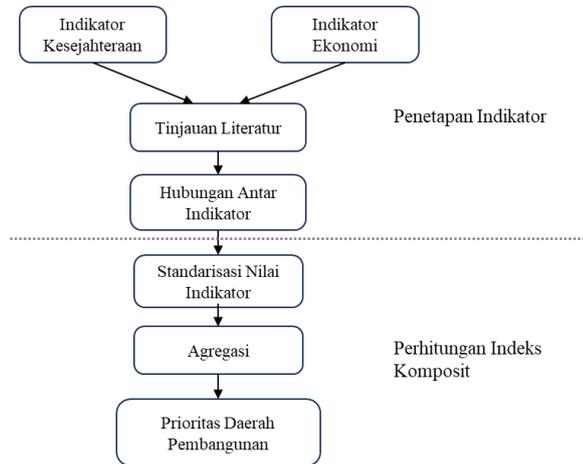
Penelitian ini berfokus pada aspek yang lebih luas daripada sekadar hasil pembangunan (*output*). Penelitian juga mempertimbangkan dampak konkret pembangunan (*outcome*) di tiap daerah di Provinsi Jawa Barat. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi prioritas pembangunan di tingkat lokal dengan metode yang sederhana dan praktis, sehingga bisa digunakan oleh banyak pihak. Kemampuan untuk mengulang metode ini juga penting, sehingga hasil penelitian ini dapat diuji ulang dan digunakan sebagai dasar kuat dalam pengambilan keputusan (Hermawan et al., 2016). Penelitian ini menggunakan indeks komposit yang telah dikembangkan sebagai alat utama untuk mengukur dan membandingkan prioritas di masing-masing daerah di provinsi ini, dengan dasar data yang tersedia.

## 2. DATA DAN METODE

### 2.1. Metode Penelitian

Dalam pembahasan metode penelitian ini, dimulai dengan menguji indikator awal sesuai dengan kriteria yang disarankan oleh OECD dalam penelitian oleh Piorr (2003). Kriteria ini mencakup empat aspek utama, yakni relevansi dengan kebijakan, penggunaan metode ilmiah, keterukuran, dan kemudahan interpretasi. Kemudian, pada Gambar 1, kerangka pikir penelitian menjelaskan langkah-langkah utama yang dilakukan dalam penelitian ini.

Indikator-indikator yang penting untuk mengukur pembangunan di Provinsi Jawa Barat dipilih dengan cermat. Setelah itu, dilakukan perhitungan indeks gabungan yang melibatkan standarisasi nilai indikator. Langkah terakhir adalah menggabungkan hasil pengukuran untuk menyusun daftar prioritas pembangunan di tingkat daerah. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah memberikan panduan bermanfaat bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat.



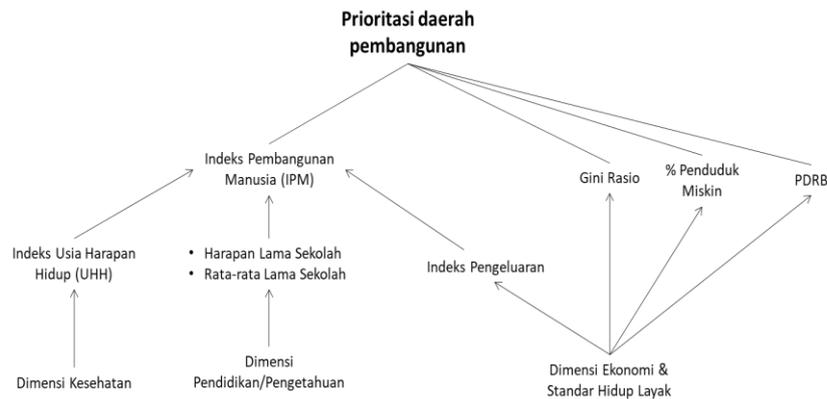
Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

### 2.1.1. Penetapan Indikator

Dalam konteks penyusunan indikator pembangunan infrastruktur daerah, penting untuk dicatat bahwa hingga saat ini belum ada standar kriteria baku yang dapat diikuti (Faradis et al., 2020). Penelitian ini memadukan indikator-indikator yang mencerminkan manfaat dari pembangunan daerah, termasuk indikator ekonomi dan kesejahteraan yang dibentuk berdasarkan indikator kesehatan dan sosial. Dalam pengembangannya, penelitian ini merujuk pada kerangka kerja yang telah didefinisikan oleh OECD (Piore, 2003) yang menetapkan empat kriteria pokok, yaitu relevansi dengan kebijakan, penerapan metode ilmiah, keterukuran, dan kemudahan interpretasi.

Tinjauan literatur terhadap studi-studi pembangunan mengungkapkan bahwa pembangunan adalah proses multidimensial yang mencakup perubahan dalam struktur sosial, falsafah hidup masyarakat, dan lembaga-lembaga kelembagaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengurangan tingkat kemiskinan, serta pengurangan ketimpangan pendapatan di daerah tersebut (Korua et al., 2016). Temuan-temuan ini juga mendapatkan dukungan dari hasil penelitian terkait ketimpangan wilayah yang terjadi di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap ketimpangan wilayah (Siagian et al., 2010).

Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah digunakan secara luas, perlu diperhatikan bahwa terdapat keterbatasan dalam kemampuannya untuk mencerminkan kondisi yang sebenarnya di suatu wilayah (Izzah, 2015). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kami memperluas kerangka kerja IPM dengan memasukkan indikator tambahan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi adalah indikator penting yang mampu menggambarkan kemajuan ekonomi suatu daerah secara komprehensif. Selain itu, kami juga memasukkan indikator ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) dan persentase penduduk miskin di daerah tersebut, yang membantu dalam mengukur tingkat ketimpangan sosial dan ekonomi yang mungkin ada (Nuraini, 2017). Gambar 2 dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan struktur dan dimensi dari indikator komposit yang digunakan dalam menentukan prioritas pembangunan di daerah. Gambar ini memberikan pandangan visual tentang bagaimana indikator-indikator tersebut terkait dan bagaimana mereka berkontribusi dalam mengevaluasi prioritas pembangunan daerah.



Sumber: UNDP, BPS

**Gambar 2.** Struktur dan Dimensi Indikator Indeks Komposit

1. Indikator ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup statistik yang menggambarkan kondisi dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Berikut adalah indikator ekonomi yang ditetapkan:
  - Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB): PDRB digunakan sebagai salah satu indikator ekonomi untuk mengukur kinerja pembangunan di suatu daerah (Bariyah, 2015). PDRB mencakup semua barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi yang beroperasi dalam wilayah domestik.
  - Persentase Penduduk Miskin: Ini adalah indikator yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (Siregar et al., 2007). Salah satu ciri meningkatnya pertumbuhan ekonomi adalah penurunan persentase penduduk miskin. Persentase penduduk miskin berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang diukur melalui pengeluaran masyarakat.
  - Gini Rasio: Gini rasio digunakan oleh lembaga-lembaga internasional sebagai salah satu indikator untuk mengukur kondisi ekonomi suatu wilayah (Dani et al., 2020). Gini rasio adalah hasil pengukuran tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dan pengeluaran masyarakat di wilayah domestik yang membandingkan tingkat kemakmuran antar kelompok.
2. Indikator kesejahteraan adalah statistik yang menggambarkan kondisi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dalam penelitian ini, indikator kesejahteraan yang ditetapkan mencakup:
  - Indeks Pembangunan Manusia (IPM): IPM adalah ukuran yang menunjukkan tingkat akses masyarakat terhadap hasil pembangunan, termasuk pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat. IPM mencerminkan bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah dimensi penting dalam mencapai kemajuan wilayah dan merupakan tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat (Rahmatulloh, 2018).

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan teliti dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020, sebagaimana tercantum pada Tabel 1. Kepercayaan pada kredibilitas dan kelanjutan data dari BPS menjadikan data ini pilihan utama. BPS, sebagai sumber data statistik kredibel, memberikan dasar yang kuat untuk memvalidasi temuan penelitian ini. Penggunaan data tahun 2020 dipilih untuk menjaga konsistensi dalam analisis dan menghindari fluktuasi data sementara. Data ini juga dianggap relevan dan mewakili kondisi pada saat itu, sesuai dengan tujuan penelitian.

**Tabel 1.** Indikator, Sumber Data, dan Waktu Data

Dasar Indikator	Indikator	Sumber data	Waktu
Indikator kesejahteraan	IPM	BPS	2020
Indikator ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PDRB</li> <li>• Persentase Penduduk Miskin</li> <li>• Gini rasio</li> </ul>	BPS	2020

Setelah mengidentifikasi indikator yang akan digunakan dalam penyusunan indeks komposit, langkah berikutnya adalah melakukan pengujian hubungan antara variabel-variabel tersebut. Tabel 2 menampilkan korelasi antara indikator yang akan digunakan dalam indeks komposit, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB), Persentase Penduduk Miskin, dan Gini Rasio. Korelasi Pearson digunakan sebagai alat untuk mengukur hubungan antar indikator ini. Pengukuran ini penting untuk menguji relevansi hubungan antara indikator-indikator komposit dalam penentuan prioritas daerah. Setiap indikator mencerminkan kepentingan relatif dalam indeks komposit, dan tingkat korelasi antara mereka menggambarkan tingkat hubungan kausal di antara indikator tersebut.

**Tabel 2.** Korelasi Antar Indikator

	IPM	PDRB	%Penduduk miskin	Gini rasio
IPM	1			
PDRB	0.29	1		
% Penduduk miskin	-0.73	-0.43	1	
Gini rasio	0.42	0.14	-0.19	1

Langkah selanjutnya adalah merumuskan model analisis, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 yang menjelaskan perumusan model analisis, data pada tingkat makro digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan ekonomi dengan menggunakan berbagai metode statistik, termasuk analisis deskriptif, korelasi, *min-max*, dan perhitungan rerata ukur. Data dikumpulkan pada satu titik waktu dan mencakup berbagai observasi pada tingkat provinsi. Dengan demikian, model analisis ini akan membantu dalam menggambarkan hubungan antara indikator kesejahteraan dan ekonomi dalam konteks tingkat provinsi.

**Tabel 3.** Perumusan Model Analisis

Atribut	Model
Tingkat analisis	Skala Makro
Indikator	Indikator yang digunakan adalah indikator kesejahteraan dan ekonomi
Metode kuantitatif	Menggunakan metode statistik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Deskriptif</li> <li>• Korelasi</li> <li>• <i>Min Max</i></li> <li>• Rata-rata ukur</li> </ul> Pola data <i>cross-section</i> /dalam 1 waktu terdiri dari beberapa observasi tingkat provinsi

### 2.1.2. Perhitungan Indeks Komposit

Standarisasi nilai minimum dan maksimum pada setiap indikator menjadi suatu kebutuhan penting karena nilai-nilai asli dari indikator tersebut memiliki satuan yang berbeda. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa interpretasi nilai minimum dan maksimum pada masing-masing indikator dapat bervariasi. Contohnya, dalam Tabel 4 indikator, indikator seperti IPM dan PDRB, skala nilai tinggi mengindikasikan kinerja yang lebih baik. Sebaliknya, pada indikator seperti persentase penduduk miskin dan rasio Gini, skala nilai rendah menunjukkan kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu, melalui standarisasi ini, kita dapat memungkinkan perbandingan yang lebih adil dan konsisten antar indikator dalam penyusunan indeks komposit. Pada Tabel 5 menjelaskan nilai minimum dan maksimum pada masing-masing indikator.

**Tabel 4.** Dasar Perhitungan Indeks Komposit

Indikator	Kategori Nilai	Dasar Penilaian
IPM	0-100 Skala	Nilai Minimum
PDRB	Rp.Milyar	Nilai Minimum
% Penduduk Miskin	0-100 %	Nilai Maksimum
Gini Rasio	0-1 Skala	Nilai Maksimum

**Tabel 5.** Minimum dan Maksimum Indikator Indeks Komposit

	IPM	PDRB	%Penduduk miskin	Gini rasio
<i>max</i>	81.5	243,195.3	13.0	0.4
<i>min</i>	65.4	3,254.9	2.5	0.3

Standarisasi nilai digunakan untuk mengnormalisasi indikator agar dapat dihitung menggunakan rata-rata ukur indeks komposit. Dalam hal ini, indeks komposit memiliki nilai minimum sebesar 0% dan nilai maksimum sebesar 100%. Proses standarisasi nilai indikator IPM, PDRB (%), persentase penduduk miskin, dan rasio Gini dilakukan dengan menggunakan empat persamaan.

$$Nipm = 100 - (nilai n - Nilai min) - (Nilai max - nilai min) \times 100 \quad (1)$$

$$Npdrb = 100 - (nilai n - Nilai min) - (Nilai max - nilai min) \times 100 \quad (2)$$

$$Npm = (nilai n - Nilai min) - (Nilai max - nilai min) \times 100 \quad (3)$$

$$Ngr = (nilai n - Nilai min) - (Nilai max - nilai min) \times 100 \quad (4)$$

Keterangan:

- Nipm : Standarisasi nilai indikator IPM
- Npdrb : Standarisasi nilai indikator PDRB
- Npm : Standarisasi nilai indikator % Penduduk Miskin
- Ngr : Standarisasi nilai indikator Gini Rasio
- Nilai n : Nilai daerah yang diamati (aktual)
- Max : Nilai maksimum indikator wilayah Provinsi Jawa Barat
- Min : Nilai minimum indikator wilayah Provinsi Jawa Barat

Proses agregasi dilakukan menggunakan persamaan 5, Agregasi adalah langkah penting dalam menghitung indeks komposit. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah rata-rata ukur untuk menggabungkan nilai indikator. Hal ini dilakukan agar nilai indikator rendah tidak terabaikan oleh yang tinggi. Bobot yang diberikan pada setiap indikator sama, sehingga setiap indikator memiliki pengaruh yang seimbang dalam menghasilkan indeks komposit wilayah. Dengan demikian, indeks ini memberikan gambaran yang adil tentang kondisi wilayah prioritas pembangunan di Provinsi Jawa Barat.

$$IKP = 3\sqrt{nipm + npdrb + npm + ngr \times 100} \quad (5)$$

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis indeks komposit prioritas daerah pembangunan di Provinsi Jawa Barat pada Tabel 6 memiliki kaitan erat dengan dampak pembangunan dan proses penentuan tingkat prioritas pembangunan. Dampak pembangunan pada dasarnya merujuk pada perubahan yang dapat diukur dan alami pada tingkat kesejahteraan masyarakat, yang melibatkan dimensi ekonomi, sosial, dan politik (Kato et al., 2021). Hasil dari indeks komposit ini memberikan pemahaman yang lebih konkrit tentang bagaimana perubahan kesejahteraan masyarakat ini tercermin dalam konteks geografis di seluruh provinsi.

Dalam penelitian ini, proses penentuan tingkat prioritas pembangunan menjadi penting karena memungkinkan pemerintah untuk fokus pada daerah-daerah yang memerlukan perhatian lebih besar dalam rangka memaksimalkan dampak positif pembangunan dengan sumber daya yang terbatas. Pembangunan daerah melibatkan banyak usulan kegiatan dari berbagai sektor, tetapi tidak semua usulan ini dapat direalisasikan karena kendala anggaran (Kurniasih, 2005).

Analisis indeks komposit juga melibatkan pengukuran hubungan antara berbagai indikator untuk menjelaskan bagaimana fenomena yang terjadi dapat tercermin dalam indeks komposit. Meskipun hasil korelasi antar indikator menunjukkan korelasi positif, mereka tidak selalu signifikan secara statistik. Ini menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki relevansi dan makna sendiri-sendiri dalam konteks pembangunan daerah.

**Tabel 6.** Indeks Komposit Prioritas Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Barat

Daerah Jawa Barat	IPM	PDRB	%Penduduk Miskin	Gini rasio	Prioritas	Ranking
Bandung Barat	83,16	88,59	76,43	58,72	75,83	1
Kuningan	75,11	94,32	98,57	44,95	74,85	2
Purwakarta	66,19	82,46	55,32	93,58	72,91	3
Sumedang	61,11	91,49	74,24	66,06	72,36	4
Kota Cirebon	40,99	94,42	67,21	100	71,41	5
Kota Tasikmalaya	52,45	94,93	100	49,54	70,47	6
Cianjur	100	88,11	75,19	34,86	69,32	7
Garut	95,29	85,27	71,58	36,7	67,97	8
Tasikmalaya	98,08	91,21	75	28,44	66,09	9
Kota Sukabumi	45,2	97,8	49,9	77,98	64,4	10
Subang	77,77	89,58	65,21	34,86	63,08	11
Bandung	56,47	67,67	42,4	93,58	62,4	12
Majalengka	86,19	92,3	85,36	22,02	62,18	13
Cirebon	79,01	87,48	83,56	23,85	60,92	14
Kota Banjar	60,74	100	34,6	0	59,46	15
Kota Bogor	33,44	87,99	40,21	91,74	57,4	16
Pangandaran	83,28	98,13	62,17	21,1	57,22	17
Bogor	68,79	37,13	49,81	63,3	53,27	18
Ciamis	68,24	92,2	49,14	22,02	51,08	19
Sukabumi	90,59	82,1	44,11	20,18	50,73	20
Indramayu	88,05	76,68	97,43	6,42	45,34	21
Kota Cimahi	22,79	92,05	25,29	62,39	42,65	22
Bekasi	46,07	0	22,53	55,05	38,51	23
Karawang	67,18	35,57	55,23	13,76	36,71	24
Kota Bandung	0	20,86	14,64	82,57	29,32	25
Kota Depok	3,34	81,3	0	29,36	19,98	26
Kota Bekasi	0,06	73,17	18,35	36,7	7,43	27

Hasil dari indeks komposit berdasarkan tingkat prioritas pembangunan memberikan landasan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk merancang kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Pada penelitian ini terdapat tiga tingkat prioritas, yaitu tingkat prioritas tinggi, tingkat prioritas menengah, dan tingkat prioritas rendah, yang membantu mengidentifikasi daerah-daerah yang memerlukan perhatian khusus dalam rangka memajukan pembangunan di Provinsi Jawa Barat.

1. Daerah-daerah dengan tingkat prioritas tertinggi, seperti Bandung Barat, Kuningan, Purwakarta, Sumedang, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan Kota Sukabumi. Daerah-daerah ini memerlukan perhatian khusus dalam upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada daerah prioritas tinggi perlu dilakukan tindakan

pemerataan yang dapat dilakukan melalui penyediaan infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur dianggap sebagai kondisi yang diperlukan untuk pengembangan pasar dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Démurger, 2001). Dukungan pembangunan dalam jangka pendek pada daerah yang memiliki nilai prioritas tinggi, hanya sedikit memberikan dampak pada perkembangan ekonomi wilayah, namun apabila tidak diperhatikan sejak dini ketimpangan antar daerah akan semakin meningkat. Pada daerah prioritas tinggi dibutuhkan dukungan lebih besar oleh Pemerintah Provinsi khususnya dalam pembangunan multi sektor dengan memerhatikan kebutuhan daerah berdasarkan tingkat pengukuran indeks komposit ditunjukkan oleh indikator pembentuknya seperti tingkat kemiskinan (%Penduduk Miskin), ketimpangan ekonomi (Gini Rasio), potensi pertumbuhan (PDRB), prioritas jangka pendek yang dapat dilakukan adalah fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti sarana irigasi, air bersih, dan sanitasi dasar, terutama di daerah yang dengan kelangkaan sumber air bersih, pembangunan jalan, jembatan dan dermaga, terutama untuk daerah terpencil dan tertinggal (Budianta, 2010).

2. Daerah-daerah dengan tingkat prioritas menengah, seperti Subang, Bandung, Majalengka, Cirebon, Kota Banjar, Kota Bogor, Pangandaran, Bogor, Ciamis, Sukabumi, Indramayu, dan Kota Cimahi, menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan dalam pembangunan di daerah-daerah ini. Meskipun berada di tingkat prioritas menengah, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan ekonomi di daerah-daerah ini dengan fokus pada pengembangan infrastruktur dasar, aksesibilitas, dan pelayanan publik yang lebih baik.
3. Daerah-daerah dengan tingkat prioritas rendah, seperti Bekasi, Karawang, Kota Bandung, Kota Depok, dan Kota Bekasi, meskipun memiliki tingkat prioritas yang lebih rendah dalam analisis indeks komposit, tetap memerlukan perhatian khusus dalam upaya pembangunan. Pada daerah ini mengindikasikan bahwa pembangunan telah memberikan dampak yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka pendek dukungan pembangunan akan cepat berdampak pada pertumbuhan ekonomi wilayah, penelitian Mahendra et al., (2019) pada daerah yang memiliki pertumbuhan tinggi, kepadatan penduduk akan berkurang karena penduduk tersebar ditunjang oleh ketersediaan lahan di daerah pinggiran kota dan aksesibilitas jalan, namun pertumbuhan daerah yang tinggi dapat memengaruhi kenaikan biaya pelayanan publik. Di kota-kota India dan Afrika, kualitas sarana jalan, drainase, sambungan air bersih menurun pada jarak 5 km dari pusat kota. Pembangunan infrastruktur di daerah dengan prioritas rendah perlu dilakukan dengan pendekatan inovatif dengan mengutamakan kualitas dan akses layanan di wilayah tersebut

Dalam praktek di lapangan, penyelenggaraan pemerintahan, program, kegiatan pembangunan, dan pelayanan publik oleh pemerintah daerah seringkali didasarkan pada paradigma pendekatan legalitas. Pada saat perumusan, penyusunan, dan penetapan kebijakan, selalu didasarkan oleh pendekatan prosedur dan keluaran (Halimah et al., 2017). Pertimbangan membuat keputusan menentukan pilihan usulan pembangunan harus disandarkan pada skala prioritas yang dinilai dari urgensitasnya dan aspek kemanfaatannya (Kurniasih, 2005).

Hasil penelitian ini dapat berperan sebagai salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan daerah dalam konteks teknokratik yang disandarkan pada metode dan kerangka berpikir ilmiah. Di Provinsi Jawa Barat, penelitian ini dapat berimplikasi pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya tingkat ketimpangan antar daerah, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Penekanan terhadap aspek kesejahteraan masyarakat merupakan kunci dari pembangunan daerah yang berkelanjutan (Halimah et al., 2017). Penentuan aspek prioritas pembangunan daerah tentunya merupakan langkah yang penting dalam mengalokasikan sumber daya dan upaya pembangunan dengan lebih efisien. Dengan berlandaskan pada hasil penelitian dan analisis indeks komposit, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih terarah dan berdasarkan bukti. Hal ini dapat membantu meningkatkan dampak positif pembangunan di berbagai wilayah Provinsi Jawa Barat. Pendekatan teknokratik dan berpikir ilmiah juga dapat memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan yang lebih rasional dan objektif dalam hal

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Ini membantu memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dimanfaatkan secara efektif dan menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Untuk menentukan daerah prioritas, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek relevansi pengukurannya. Penelitian ini merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi daerah prioritas yang memerlukan percepatan pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Dalam konteks ini, infrastruktur yang memadai menjadi faktor kunci untuk mewujudkan pembangunan yang lebih cepat dan efektif (Noviyanti et al., 2020). Pengembangan indikator komposit untuk menilai kebutuhan daerah dapat diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan daerah, terutama untuk mendukung definisi tujuan sosial ekonomi strategis pemerintah daerah (Oppio et al., 2017). Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi daerah prioritas dengan tiga aspek prioritas: kesehatan, sosial, dan ekonomi.

#### 4. KESIMPULAN

Indeks komposit prioritas pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat adalah alat yang sangat relevan dalam mengkaji dampak pembangunan dan menentukan tingkat prioritas pembangunan. Dampak pembangunan ini mencakup perubahan signifikan dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan politik, yang sangat memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pentingnya indeks komposit terletak pada kemampuannya untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana perubahan ini terjadi di seluruh wilayah provinsi.

Proses penentuan tingkat prioritas pembangunan juga merupakan tahap yang krusial dalam pengelolaan sumber daya pembangunan. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah perlu memfokuskan perhatiannya pada daerah-daerah yang memerlukan perhatian lebih besar. Meskipun ada korelasi positif antara indikator dalam indeks komposit, penting untuk dicatat bahwa tidak semua korelasi tersebut signifikan secara statistik. Ini mengindikasikan bahwa setiap indikator memiliki makna dan relevansi sendiri dalam konteks pembangunan daerah.

Penelitian Indeks komposit ini mengidentifikasi daerah-daerah berdasarkan prioritas pembangunan menjadi tiga kategori utama: prioritas tinggi, prioritas menengah, dan prioritas rendah. Hal ini memberikan panduan yang sangat berharga bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merancang kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Dengan demikian, upaya pembangunan dapat lebih tepat sasaran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan antar daerah.

Penting juga untuk menyoroti peran infrastruktur dalam mendukung percepatan pembangunan, terutama di daerah-daerah dengan prioritas tinggi. Fokus pada pengembangan infrastruktur dasar seperti irigasi, air bersih, sanitasi, jalan, jembatan, dan dermaga menjadi kunci dalam upaya pemerataan pembangunan. Pendekatan teknokratik dan berpikir ilmiah terbukti efektif dalam pengambilan keputusan yang lebih rasional dan objektif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam konteks daerah-daerah prioritas, ada sejumlah kendala yang perlu diperhatikan, termasuk keterbatasan data dan kesulitan dalam menentukan prioritas. Namun, penelitian ini menawarkan prinsip kemudahan dalam penyusunan indikator dan teknik perhitungannya. Pengukuran indeks komposit juga dapat diterapkan di tingkat kabupaten/kota, dengan potensi penambahan indikator kebijakan, hasil infrastruktur, dan manfaat untuk membuat perhitungan lebih komprehensif dan menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan pembangunan yang harus diprioritaskan di wilayah tersebut.

#### 5. PERNYATAAN RESMI

Terimakasih Kepada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, SAPPK, Institut Teknologi Bandung dan Administrasi Bisnis, FISIP, Universitas Padjajaran yang telah membantu dalam proses penulisan penelitian ini. Bantuan dan dukungan dari lembaga ini sangat berarti dalam menyelesaikan studi ini dengan baik. Terima kasih atas kontribusi yang berharga dalam pengembangan pengetahuan dan pemahaman kami dalam bidang ini.

## 6. REFERENSI

- Aprianoor, P., & Muktiali, M. (2015). Kajian Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Barat. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 4(4), 484–498.
- Bariyah, N. (2015). Analisis Indikator Fundamental Ekonomi Daerah di Kalimantan Barat: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan HDI. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan (JEBIK)*, 4(1), 72–93.
- Budianta, A. (2010). Pengembangan wilayah Perbatasan Sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah di Indonesia. *SMARTek*, 8, 72–82.
- Dani, A. T. R. I. R. ... Ainurrochmah, A. (2020). Pengujian Hipotesis Simultan Model Regresi Nonparametrik Spline Truncated dalam Pemodelan Kasus Ekonomi. *JAMBURA Journal of Probability and Statistics*, 1(2), 98–106.
- Démurger, S. (2001). Infrastructure Development and Economic Growth: An Explanation for Regional Disparities in China? *Journal of Comparative Economics*, 29(1), 95–117. Retrieved from <https://doi.org/10.1006/jcec.2000.1693>
- Faradis, R., & Afifah, U. N. (2020). Indeks Komposit Pembangunan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Indonesia Infrastructure Development Composite Index of Provinces in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 20(Januari), 33–55.
- Freudenberg, M. (2003). Composite Indicators of Country Performance: A Critical Assessment.
- Halimah, M., & Karyana, A. (2017). Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Dalam Musrenbang Kecamatan. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(1), 74–87.
- Hermawan, S., & Amirullah, A. (2016). Metode Penelitian Binsis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif. *Media Nusa Creative*.
- Izzah, N. (2015). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Riau tahun 1994-2013. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(2), 156–172.
- Kato, I. ... Silalahi, M. (2021). Manajemen Pembangunan Daerah. *Yayasan Kita Menulis*.
- Korua, F. S. ... Siwu, H. F. D. (2016). Pengaruh Investasi Pemerintah Terhadap Sebagai Intervening Variabel Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2003-2013, 16(01), 410–417.
- Kurniasih, D. (2005). Model Skala Prioritas Pembangunan Kota Bandung Berbasis Good Governance. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 72. Retrieved from <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.125>
- Mahendra, A., & Seto, K. C. (2019). Upward and Outward Growth : Managing Urban Expansion for More Equitable Cities in the Global South, 72. Retrieved from [www.citiesforall.org](http://www.citiesforall.org)
- Noviyanti, D. ... Sahara, S. (2020). Analisis Perkembangan Wilayah Provinsi Jawa Barat Untuk Arah Pembangunan Berbasis Wilayah Pengembangan. *Jurnal Geografi*, 12(01), 280. Retrieved from <https://doi.org/10.24114/jg.v12i01.14799>
- Nuraini, I. (2017). Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *FEB Unikama*, 79–93.
- Oppio, A. ... Mattia, S. (2017). Infrastructure Development and Territorial Vulnerability. The Role of Composite Indicators for Addressing Siting Decisions. In *Appraisal: From Theory to Practice* (pp. 277–290). Springer.
- Piorr, H. P. (2003). Environmental policy, Agri-Environmental Indicators and Landscape Indicators. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 98(1–3), 17–33. Retrieved from [https://doi.org/10.1016/S0167-8809\(03\)00069-0](https://doi.org/10.1016/S0167-8809(03)00069-0)
- Priyarsono, D. S. (2017). Membangun dari Pinggiran: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Ekonomi Regional. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan)*, 1(1), 42–52.
- Rahmatulloh, R. (2018). Dinamika kependudukan di ibukota Jakarta (Deskripsi Perkembangan Kuantitas, Kualitas dan Kesejahteraan Penduduk di DKI Jakarta). *Genta Mulia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 8(2).
- Saisana, M. ... Tarantola, S. (2005). Uncertainty and Sensitivity Analysis Techniques as Tools for the Quality Assessment of Composite Indicators. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society)*, 168(2), 307–323.
- Siagian, A., & Miyasto, R. (2010). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Wilayah (Studi Kasus Propinsi Jawa Barat). *Universitas Diponegoro*.
- Siregar, H., & Wahyuniarti, D. (2007). Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. *Economics Development*, 1–28.